

**Peran Hutan Kemasyarakatan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Desa Ngarip Kabupaten Tanggamus**

*Role of Community Forestry in Farmers Welfare Improvement at District Ngarip Tanggamus*

**Susni Herawati** <sup>1)</sup>

1) *Dosen Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung  
Jl. Soekarno Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung*

**Abstract**

*Poverty is one of the social economic problem in the world that influence stability of the country in multi sector. In Indonesia, poverty level reach about 14% and 63% is in rural area. Ministry of forestry has important role to improve forestry sector through their program which called community forestry as one of schemes of forest management based on community. This study aims to identify role of community forestry to increase human welfare, to analyse life worth living and land area needed. This research was conducted in Desa Ngarip, Lampung Province for 2 months. Data were analyzed by quantitative and descriptive method. The result showed that community forestry had high contribution. It was 53% to total income. Based on life worth living analysis, the highest cost was basic necessities and it attempted to 60% to total cost. If compared with profit level of farmer, land area needed was 1,8 hectare to meet farmer requirements.*

*Keywords: role of community forestry, life worth living*

**Pendahuluan**

Salah satu masalah sosial ekonomi bangsa Indonesia yang harus segera diatasi adalah masalah kemiskinan yang merupakan masalah mendasar di seluruh negara berkembang. Kemiskinan merupakan embrio munculnya masalah sosial ekonomi lainnya yang dapat menghambat pembangunan dan mengganggu kestabilan di berbagai sektor pembangunan. Berdasarkan data dari BPS (2010), tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia mencapai 14% dan sebesar 63% tingkat kemiskinan berada pada masyarakat perdesaan yang mayoritas bermata pencaharian petani. Tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung mencapai 20,22% dengan tingkat kemiskinan untuk daerah perkotaan dan perdesaan sebesar 16,78% dan 21,49%.

Desa Ngarip merupakan salah satu desa di kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus dengan jumlah penduduk sebanyak 1.150 kepala keluarga (Pekon Ngarip 2010) dan sekitar 83% bermata pencaharian petani baik petani pemilik lahan, petani pengelola HKm maupun

petani buruh. Lahan pertanian yang dimiliki petani terdiri dari lahan milik dan lahan hutan kemasyarakatan (HKm) dengan rata-rata luas kepemilikan masing-masing lahan adalah 0,75 hektar dan 1 hektar. Sebagian besar penduduk mengelola pertanian lahan kering dengan komoditas yang paling banyak diusahakan adalah kopi, kakao dan lada.

Tidak semua masyarakat memiliki lahan milik dan tidak semua pula masyarakat memiliki lahan HKm namun beberapa kepala keluarga ada yang memiliki kedua-duanya. Melihat kenyataan tersebut, maka studi mengenai peran HKm dalam meningkatkan kesejahteraan petani menjadi penting. Masyarakat Desa Ngarip yang telah memperoleh izin HKm sebanyak 560 orang dan dimungkinkan jumlah ini akan terus bertambah. HKm sendiri merupakan hutan negara yang dikelola oleh masyarakat dengan terlebih dahulu mengajukan izin HKm.

Berdasarkan Permenhut Nomor 37 Tahun 2007, hutan kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Izin HKm diperoleh melalui suatu prosedur dan peraturan tertentu yang harus dipenuhi oleh masyarakat salah satunya adalah pemanfaatan lahan dengan sistem agroforestri yang dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi dan ekologi bagi lingkungan. Melalui izin usaha pemanfaatan HKm (IUPHKm), masyarakat diberi peluang untuk merehabilitasi hutan yang rusak di areal kelola mereka.

Sampai dengan tahun 2009, target HKm baru terealisasi melalui izin sementara seluas 5.832,20 hektar di tiga kabupaten, sisanya sedang menunggu proses. Padahal target HKm di Lampung pada tahun 2009 adalah 85.000 hektar. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi peran hutan kemasyarakatan bagi kesejahteraan petani, menganalisis kebutuhan hidup layak petani, dan menganalisis kebutuhan luas lahan petani Desa Ngarip untuk pemenuhan kebutuhan hidup layak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan, masyarakat dan para *stakeholder* yang berkepentingan terhadap HKm.

## **Metode Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Desa Ngarip, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung selama dua bulan yaitu dari bulan September sampai dengan bulan November 2011. Desa ini dipilih secara sengaja menjadi wilayah penelitian karena beberapa pertimbangan, yaitu berada di Kabupaten Tanggamus yang merupakan wilayah pengembangan HKm, memiliki kelengkapan data pendukung yang baik dan desa ini telah mendapatkan izin HKm pada tahun 2007.

Data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder yang meliputi data biofisik dan sosial ekonomi. Data primer terdiri dari data vegetasi dan data sosial ekonomi. Data sosial ekonomi yang dibutuhkan berupa data produksi, biaya dan pendapatan dari usahatani. Data sekunder meliputi data sosial ekonomi dan data-data pendukung lainnya. Pengumpulan

[Type text]

data primer dilakukan melalui wawancara terstruktur dan semi terstruktur dan studi literatur. Tujuannya adalah untuk menentukan karakteristik sosial ekonomi, kebutuhan hidup layak, dan kebutuhan luas lahan masyarakat Desa Ngarip. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait yaitu Kecamatan Ulu Belu, Pekon Ngarip, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, BPS, BPDAS Provinsi Lampung, literatur-literatur dan institusi yang terkait.

Pengambilan sampel responden dilakukan secara *purposive sampling*. Responden yang diambil sebagai sampel adalah petani yang mendapatkan izin HKm baik yang memiliki lahan milik atau pun yang tidak memiliki lahan milik. Sampel yang diambil sebanyak 10% dari populasi anggota HKm yaitu 56 orang.

Analisis mengenai peran HKm dalam meningkatkan kesejahteraan petani dilakukan dengan melihat kontribusi pendapatan dari lahan HKm terhadap total pendapatan petani. Kontribusi pendapatan yang tinggi akan memberikan pandangan positif terhadap HKm, sebaliknya kontribusi yang rendah akan menimbulkan pandangan negatif terhadap HKm.

Perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) dilakukan melalui pendekatan aktual dan pendekatan Sinukaban (2007). KHL aktual diukur berdasarkan biaya yang dikeluarkan petani untuk memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, keagamaan, rekreasi, tabungan dan kegiatan sosial. KHL Sinukaban dihitung dengan mengalikan 250% dengan kebutuhan fisik minimum. Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) adalah kebutuhan beras (kg/org/thn) x harga (Rp/kg) x jumlah anggota keluarga (org/KK). Kebutuhan beras tersebut dinyatakan dalam nilai rupiah per bulan, ekuivalen dengan nilai tukar beras dalam kg per orang per tahun sehingga dapat dibandingkan dengan nilai tukar antar daerah dan antar waktu (zaman) baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Nilai ambang kecukupan pangan untuk tingkat pengeluaran rumah tangga di daerah pedesaan berkisar antara 240 – 320 kg per orang per tahun, daerah perkotaan 360 – 480 kg per orang per tahun (Sajogyo 1996). Bila keuntungan usahatani tidak dapat memenuhi KHL ( $\frac{KHL}{\pi} \geq 1$ ) diperlukan analisis luas lahan yang seharusnya petani miliki untuk memenuhi KHL.

Pemenuhan kebutuhan hidup layak berkaitan dengan luas lahan yang dimiliki atau dikelola petani. Semakin luas lahan yang dimiliki petani maka kebutuhan hidup layak makin dapat terpenuhi, dengan catatan lahan tersebut dalam kondisi produktif. Petani perlu menambah luas lahan apabila keuntungan usahatani tidak memenuhi standar KHL ( $\frac{KHL}{\pi} \geq 1$ ). Analisis kebutuhan luas lahan dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

$$Lm = \frac{KHL}{\pi} \times 1 \text{ hektar}$$

[Type text]

Keterangan:

KHL = Kebutuhan hidup layak (Rp/KK/tahun)

Lm = Luas lahan minimal (ha)

$\pi$  = Keuntungan dari lahan HKm (Rp)

Perhitungan keuntungan dilakukan dengan menggunakan analisis anggaran arus uang tunai (*cash flow analysis*) yang terdiri dari pendapatan dan biaya (Soeharjo dan Patong 1973, Newnan 1990, Sinaga 1992, Brigham dan Gapenski 1991, Mulyadi 1992, Soekartawi 2002, Umar 2003). Perhitungan analisis arus uang tunai dalam penelitian ini menggunakan beberapa asumsi, yaitu:

1. Faktor biofisik lahan seperti kesuburan tanah, kelerengan, unsur-unsur pembentuk lahan diasumsikan sama untuk setiap sampel lahan.
2. Perhitungan pendapatan dilakukan ketika semua jenis tanaman telah berproduksi yaitu pada tahun ke-7 dan diasumsikan semua tanaman dapat hidup
3. Produktivitas dan harga dianggap konstan
4. Harga komoditas dan produktivitas tanaman menggunakan data-data yang berlaku di lapangan pada saat penelitian
5. Selera petani terhadap jenis dianggap tetap
6. Modal usaha tani yang dibutuhkan menggunakan pendekatan biaya yang digunakan selama proses produksi

## Hasil Dan Pembahasan

### Pendapatan Petani Desa Ngarip

Berdasarkan hasil perhitungan secara kuantitatif diperoleh pendapatan rumah tangga petani responden rata-rata sebesar Rp 18.344.917 per tahun. Sumber pendapatan petani terbesar berasal dari lahan HKm sedangkan sumber pendapatan terkecil berasal dari jasa transportasi. Rekapitulasi rata-rata pendapatan petani Desa Ngarip disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Rekapitulasi rata-rata pendapatan petani Desa Ngarip

No	Sumber pendapatan	Pendapatan (Rp/th)	Persen (%)
1	Petani HKm	9.819.563	39,68
2	Petani lahan milik	5.826.270	23,55
3	Guru	259.375	1,05
4	Jasa transportasi	6.250	0,03
5	Tukang	1.546.875	6,25
6	Buruh	215.937	0,87
7	Kayu bakar	198.437	0,80
8	Ternak	686.979	2,78
9	Warung	2.785.416	11,26
10	Penjaga toko	1.162.500	4,70
11	Pembantu RT	1.275.000	5,15

[Type text]

12	Petani penyakap	962.500	3,89
	Total pendapatan	18.344.917	100

Berdasarkan sumber pendapatan, sekitar 35% petani memiliki pekerjaan sampingan dan sekitar 65% petani tidak memiliki pekerjaan sampingan. Petani yang memiliki pekerjaan sampingan, sekitar 10% memiliki usaha ternak, 12% memiliki usaha warung dan sisanya memiliki usaha tukang, jasa transportasi dan lain-lain. Pada umumnya petani yang memiliki usaha ternak memiliki curahan waktu kerja yang lebih lama daripada petani lainnya. Petani lainnya menghabiskan waktu kerja sekitar 6 – 8 jam, sedangkan petani peternak menghabiskan waktu lebih dari petani lainnya sehingga waktu santai yang dimiliki petani peternak lebih sedikit.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sumber pendapatan terbesar berasal dari lahan HKm, yaitu 39% dari total pendapatan petani. Kontribusi pendapatan HKm yang cukup besar ini menunjukkan bahwa HKm sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

### **Kebutuhan Hidup Layak (KHL)**

KHL petani Desa Ngarip terdiri dari kebutuhan untuk konsumsi, pendidikan, kesehatan, perumahan, sosial, pajak, listrik, pakaian, transportasi, komunikasi dan tabungan. Hasil perhitungan KHL aktual menunjukkan bahwa biaya terbesar petani adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sebesar Rp 8.600.000 per tahun per kepala keluarga. Biaya terkecil yaitu biaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan. Rekapitulasi biaya untuk memenuhi KHL disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Rekapitulasi biaya untuk memenuhi KHL

No	Komponen KHL	(Rp/th)
1	Konsumsi	8.629.263
2	Pendidikan	1.539.250
3	Kesehatan	202.505
4	Perumahan	15.375
5	Sosial	1.146.146
6	Pajak	124.133
7	Listrik	263.188
8	Pakaian	756.979
9	Transportasi	292.500
10	Komunikasi	233.125
11	Tabungan	1.200.354
	Total KHL	14.402.818

Hasil perhitungan KHL tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan konsumsi merupakan kebutuhan utama dan mendasar yang harus dipenuhi petani dibandingkan kebutuhan lainnya, yaitu 60% dari semua komponen KHL petani. Jika kebutuhan konsumsi ini tidak dipenuhi,

[Type text]

maka petani tidak bisa hidup sedangkan kebutuhan perumahan tidak menjadi kebutuhan dasar karena kebutuhan ini kurang penting bagi petani. Hasil perhitungan KHL aktual ini sejalan dengan hasil perhitungan KHL Sinukaban. KHL Sinukaban sendiri adalah Rp 13.200.000 – 17.600.000 per kepala keluarga (KK) per tahun dengan jumlah keluarga rata-rata sebanyak 4 orang per KK. Jika dibandingkan dengan KHL di Provinsi Lampung, KHL di Desa Ngarip lebih tinggi. Menurut Kemenkertrans (2011), KHL di Provinsi Lampung yaitu Rp 897.600 per bulan atau Rp 10.771.200 per tahun.

### **Biaya Hidup Petani Desa Ngarip**

Biaya hidup petani Desa Ngarip berasal dari biaya-biaya produksi dari lahan milik dan lahan HKm dan biaya KHL petani. Biaya produksi terdiri dari biaya bibit, pupuk, obat-obatan, upah tenaga kerja, alat-alat pertanian, pajak lahan dan lain-lain. Rekapitulasi pengeluaran petani Desa Ngarip disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Rekapitulasi biaya Hidup petani Desa Ngarip

<b>No</b>	<b>Komponen biaya</b>	<b>Rp/th</b>
1	Biaya produksi untuk lahan milik	1.600.000
2	Biaya produksi untuk lahan HKm	1.900.000
3	KHL	14.402.818
Total pengeluaran		17.902.818

### **Kebutuhan Luas Lahan**

Keuntungan dari mengelola lahan HKm diperoleh dengan mengurangi sumber pendapatan dari lahan HKm dengan biaya produksinya. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh keuntungan mengelola lahan HKm sebesar Rp 7.919.563, sehingga kebutuhan luas lahan HKm untuk memenuhi KHL petani adalah 1,8 hektar. Luas lahan aktual yang dikelola petani HKm rata-rata seluas 1 hektar. Jadi kekurangan luas lahan adalah 0,8 hektar agar petani dapat memenuhi KHL nya.

### **Kesimpulan Dan Saran**

#### **Kesimpulan**

- 1) Kontribusi HKm dalam meningkatkan kesejahteraan petani cukup tinggi yaitu 53% dari total pendapatan petani.
- 2) Biaya terbesar untuk memenuhi KHL petani adalah biaya konsumsi yaitu 60% dari komponen KHL petani
- 3) Luas lahan HKm yang dibutuhkan petani untuk memenuhi KHL adalah 1,8 hektar sehingga petani masih kekurangan lahan seluas 0,8 hektar untuk memenuhi KHL.

## **Saran**

- 1) Pemerintah sebaiknya memperbanyak pemberian izin HKm kepada petani karena HKm memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
- 2) Pemerintah hendaknya mempertimbangkan kembali luas lahan HKm yang diterima masing-masing petani mengingat KHL petani dapat dipenuhi dengan mengelola lahan seluas 1,8 hektar.

## **Daftar Pustaka**

- Badan Pusat Statistik. 2010. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/kota*. Tanggamus.
- Brigham EF dan Gapenski LC. 1991. *Financial Management: theory and practice*. Sixth edition. The Dryden Press. USA.
- Kementerian Kehutanan. 2007. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.37/Menhut-II/2007 tentang hutan kemasyarakatan. Kemenhut Dirjen BPDAS dan PS Direktorat BPS.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2011. *Kebutuhan Hidup Layak Provinsi di Indonesia Tahun 2011*. Jakarta.
- Newnan DG. 1990. *Engineering Economic Analysis*. Third Edition. Binarupa Aksara. Jakarta Barat.
- Pekon Ngarip. 2010. *Profil Pekon Ngarip Kecamatan Ulu Belu Tahun 2010*. Tanggamus: Kabupaten Tanggamus Lampung.
- Sajogyo. 1996. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Sinaga M. 1992. *Akuntansi Biaya: Suatu Pendekatan Manajerial*. Erlangga. Jakarta.
- Sinukaban N. 2007. *Membangun Pertanian Menjadi Industri yang Lestari dengan Pertanian Berkelanjutan*. Di dalam: Sinukaban N, penulis. *Konservasi Tanah dan Air. Kunci Pembangunan Berkelanjutan*. Dirjen RLPS. Jakarta.
- Soeharjo A dan Patong D. 1973. *Sendi-Sendi Pokok Ilmu Usahatani*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Soekartawi. 2002. *Analisis Usahatani*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Umar H. 2003. *Studi Kelayakan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka. Jakarta.